



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

- Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri (Lembaran Daerah

- Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 66);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dan Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sukabumi Utara Tahun 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 2);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.244.515.906.805,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah Rp4.117.862.148.383,00
- b. Belanja Daerah Rp4.168.280.906.805,00
Surplus/(Defisit) Rp(50.418.758.422,00)
- c. Pembiayaan Daerah
 1. Penerimaan Rp126.653.758.422,00
 2. Pengeluaran Rp76.235.000.000,00

Pembiayaan Neto Rp50.418.758.422,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Rp00,00
Berkenaan

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari :

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp668.360.859.768,00 |
| b. Pendapatan Transfer | Rp3.409.151.835.615,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan yang Sah | Rp40.349.453.000,00 |

Pasal 3

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari :

- | | |
|--|----------------------|
| a. Pajak Daerah | Rp289.197.000.000,00 |
| b. Retribusi Daerah | Rp17.155.360.000,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp11.166.150.000,00 |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | Rp350.842.349.768,00 |

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari :

- | | |
|---|------------------------|
| a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Rp3.114.732.040.000,00 |
| b. Pendapatan Transfer Antar Daerah | Rp294.419.795.615,00 |

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari Pendapatan Hibah sebesar Rp40.349.453.000,00.

Pasal 4

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| a. Belanja Operasi | Rp2.977.297.445.154,00 |
| b. Belanja Modal | Rp493.352.279.317,00 |
| c. Belanja Tidak Terduga | Rp25.000.000.000,00 |
| d. Belanja Transfer | Rp672.631.182.334,00 |

Pasal 5

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas :

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp1.399.011.930.535,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp1.403.827.588.619,00 |
| c. Belanja Hibah | Rp157.182.926.000,00 |
| d. Belanja Bantuan Sosial | Rp17.275.000.000,00 |

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas :

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| a. Belanja Modal Tanah | Rp26.984.944.650,00 |
| b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp121.716.757.194,00 |
| c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp246.457.834.190,00 |

- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp72.428.121.333,00
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp25.429.421.950,00
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya Rp335.200.000,00
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga sebesar Rp25.000.000.000,00.
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas :
- a. Belanja Bagi Hasil Rp35.291.878.600,00
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Rp637.339.303.734,00

Pasal 6

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan Rp126.653.758.422,00
- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp76.235.000.000,00

Pasal 7

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp126.653.758.422,00.
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas :
- a. Pembentukan Dana Cadangan Rp35.000.000.000,00
 - b. Penyertaan Modal Daerah Rp41.235.000.000,00

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dengan terlebih dahulu merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran

- berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
 - (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
 - (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
 - (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
 - (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multi years*);
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal, 22 Desember 2022

BUPATI SUKABUMI,



MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu

pada tanggal, 22 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,



ADE SURYAMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA
BARAT: 10/286/2022

**KABUPATEN SUKABUMI RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA,
DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 null**

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	668.360.859.768
4.1.01	Pajak Daerah	289.197.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	17.155.360.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.166.150.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	350.842.349.768
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.409.151.835.615
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.114.732.040.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	294.419.795.615
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	40.349.453.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	40.349.453.000
	Jumlah Pendapatan	4.117.862.148.383
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	2.977.297.445.154
5.1.01	Belanja Pegawai	1.399.011.930.535
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.403.827.588.619
5.1.05	Belanja Hibah	157.182.926.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	17.275.000.000
5.2	BELANJA MODAL	493.352.279.317
5.2.01	Belanja Modal Tanah	26.984.944.650
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	121.716.757.194
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	246.457.834.190
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.428.121.333
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.429.421.950
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	335.200.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	672.631.182.334
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	35.291.878.600
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	637.339.303.734
	Jumlah Belanja	4.168.280.906.805
	Total Surplus/(Defisit)	(50.418.758.422)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	126.653.758.422
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	126.653.758.422
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	126.653.758.422
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	76.235.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	35.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	41.235.000.000

Kode	Uraian	Jumlah
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	76.235.000.000
	Pembiayaan Netto	50.418.758.422
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0



Bupati Sukabumi

Marwan Hamami



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 21. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 66);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dan Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sukabumi Utara Tahun 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 2);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 96);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 103);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp4.244.515.906.805,00 bertambah sebesar Rp291.321.000.285,00 sehingga menjadi Rp4.535.836.907.090,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah		
1. semula	Rp4.117.862.148.383,00	
2. bertambah	Rp233.993.467.005,00	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan		Rp4.351.855.615.388,00
b. Belanja Daerah		
1. semula	Rp4.168.280.906.805,00	
2. bertambah	Rp326.321.000.285,00	
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan		Rp4.494.601.907.090,00
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan Pembiayaan		
a) semula	Rp126.653.758.422,00	
b) bertambah	Rp57.327.533.280,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		Rp183.981.291.702,00
2. Pengeluaran Pembiayaan		
a) semula	Rp76.235.000.000,00	
b) berkurang	(Rp35.000.000.000,00)	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan		Rp41.235.000.000,00

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. semula	Rp668.360.859.768,00	
2. bertambah	Rp17.098.900.000,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp685.459.759.768,00
b. Pendapatan Transfer		
1. semula	Rp3.409.151.835.615,00	
2. bertambah	Rp210.894.567.005,00	
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan		Rp3.620.046.402.620,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1. semula	Rp40.349.453.000,00	
2. bertambah	Rp6.000.000.000,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan		Rp46.349.453.000,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

a. Pajak Daerah		
1. semula	Rp289.197.000.000,00	
2. bertambah	Rp5.730.000.000,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		Rp294.927.000.000,00

- b. Retribusi Daerah
 - 1. semula Rp17.155.360.000,00
 - 2. bertambah Rp0,00
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp17.155.360.000,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 1. semula Rp11.166.150.000,00
 - 2. bertambah Rp0,00
 - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp11.166.150.000,00
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 - 1. semula Rp350.842.349.768,00
 - 2. bertambah Rp11.368.900.000,00
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan Rp362.211.249.768,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - 1. semula Rp3.114.732.040.000,00
 - 2. bertambah Rp76.694.283.267,00
 - Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp3.191.426.323.267,00
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
 - 1. semula Rp294.419.795.615,00
 - 2. bertambah Rp134.200.283.738,00
 - Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp428.620.079.353,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :

- Pendapatan Hibah
- a. semula Rp40.349.453.000,00
 - b. bertambah Rp6.000.000.000,00
 - Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp46.349.453.000,00

Pasal 4

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

- a. Belanja Operasi
 - 1. semula Rp2.977.297.445.154,00
 - 2. bertambah Rp307.412.224.179,00
 - Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp3.284.709.669.333,00
- b. Belanja Modal
 - 1. semula Rp493.352.279.317,00
 - 2. bertambah Rp12.341.212.781,00
 - Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp505.693.492.098,00
- c. Belanja Tidak Terduga
 - 1. semula Rp25.000.000.000,00
 - 2. berkurang (Rp7.234.302.675,00)
 - Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp17.765.697.325,00
- d. Belanja Transfer
 - 1. semula Rp672.631.182.334,00

2. bertambah Rp13.801.866.000,00
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp686.433.048.334,00

Pasal 5

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 1. semula | Rp1.399.011.930.535,00 | |
| 2. bertambah | Rp62.258.428.886,00 | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | | Rp1.461.270.359.421,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 1. semula | Rp1.403.827.588.619,00 | |
| 2. bertambah | Rp157.064.753.949,00 | |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan | | Rp1.560.892.342.568,00 |
- c. Belanja Hibah
- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. semula | Rp157.182.926.000,00 | |
| 2. bertambah | Rp89.164.041.344,00 | |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | | Rp246.346.967.344,00 |
- d. Belanja Bantuan Sosial
- | | | |
|---|----------------------|---------------------|
| 1. semula | Rp17.275.000.000,00 | |
| 2. berkurang | (Rp1.075.000.000,00) | |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan | | Rp16.200.000.000,00 |

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari :

- a. Belanja Modal Tanah
- | | | |
|--|-----------------------|---------------------|
| 1. semula | Rp26.984.944.650,00 | |
| 2. berkurang | (Rp15.859.505.633,00) | |
| Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan | | Rp11.125.439.017,00 |
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. semula | Rp121.716.757.194,00 | |
| 2. berkurang | (Rp7.028.508.244,00) | |
| Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan | | Rp114.688.248.950,00 |
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. semula | Rp246.457.834.190,00 | |
| 2. berkurang | (Rp8.902.118.484),00 | |
| Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan | | Rp237.555.715.706,00 |
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
- | | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. semula | Rp72.428.121.333,00 | |
| 2. bertambah | Rp22.678.454.995,00 | |
| Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan | | Rp95.106.576.328,00 |
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- | | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. semula | Rp25.429.421.950,00 | |
| 2. bertambah | Rp21.788.090.147,00 | |
| Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan | | Rp47.217.512.097,00 |

- f. Belanja Modal Aset Lainnya
- | | | |
|---|--------------------|--------|
| 1. semula | Rp335.200.000,00 | |
| 2. berkurang | (Rp335.200.000,00) | |
| Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan | | Rp0,00 |
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri dari :
- Belanja Tidak Terduga
- | | | |
|--|----------------------|---------------------|
| a. semula | Rp25.000.000.000,00 | |
| b. berkurang | (Rp7.234.302.675,00) | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | | Rp17.765.697.325,00 |
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari :
- a. Belanja Bagi Hasil
- | | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. semula | Rp35.291.878.600,00 | |
| 2. bertambah | Rp573.000.000,00 | |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan | | Rp35.864.878.600,00 |
- b. Belanja Bantuan Keuangan
- | | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. semula | Rp637.339.303.734,00 | |
| 2. bertambah | Rp13.228.866.000,00 | |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan | | Rp650.568.169.734,00 |

Pasal 6

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan
- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. semula | Rp126.653.758.422,00 | |
| 2. bertambah | Rp57.327.533.280,00 | |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan | | Rp183.981.291.702,00 |
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- | | | |
|---|-----------------------|---------------------|
| 1. semula | Rp76.235.000.000,00 | |
| 2. berkurang | (Rp35.000.000.000,00) | |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | | Rp41.235.000.000,00 |

Pasal 7

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

- | | | |
|---|----------------------|----------------------|
| a. semula | Rp126.653.758.422,00 | |
| b. bertambah | Rp57.327.533.280,00 | |
| Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan | | Rp183.981.291.702,00 |

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari :

a. Pembentukan Dana Cadangan

- | | | |
|--------------|-----------------------|--|
| 1. semula | Rp35.000.000.000,00 | |
| 2. berkurang | (Rp35.000.000.000,00) | |

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp0,00
b. Penyertaan Modal Daerah	
1. semula	Rp41.235.000.000,00
2. bertambah	Rp0,00
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan	Rp41.235.000.000,00

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluarannya melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program beserta hasil, Kegiatan beserta Keluaran, dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;

- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multi years*);
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah;
- q. Lampiran XVII Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022;
- r. Lampiran XVIII Neraca Daerah per 31 Desember 2022; dan
- s. Lampiran XIX Laporan Arus Kas (SAP) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022.

Pasal 10

Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal, 30 OKTOBER 2023



BUPATI SUKABUMI,

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal, 30 OKTOBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ADE SURYAMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2023 NOMOR, | |
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT



KABUPATEN SUKABUMI
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	668.360.859.768	685.459.759.768	17.098.900.000	3 %
4.1.01	Pajak Daerah	289.197.000.000	294.927.000.000	5.730.000.000	2 %
4.1.02	Retribusi Daerah	17.155.360.000	17.155.360.000	0	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.166.150.000	11.166.150.000	0	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	350.842.349.768	362.211.249.768	11.368.900.000	3 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.409.151.835.615	3.620.046.402.620	210.894.567.005	6 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.114.732.040.000	3.191.426.323.267	76.694.283.267	2 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	294.419.795.615	428.620.079.353	134.200.283.738	46 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	40.349.453.000	46.349.453.000	6.000.000.000	15 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	40.349.453.000	46.349.453.000	6.000.000.000	15 %
	Jumlah Pendapatan	4.117.862.148.383	4.351.855.615.388	233.993.467.005	6 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	2.977.297.445.154	3.284.709.669.333	307.412.224.179	10 %
5.1.01	Belanja Pegawai	1.399.011.930.535	1.461.270.359.421	62.258.428.886	4 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.403.827.588.619	1.560.892.342.568	157.064.753.949	11 %
5.1.05	Belanja Hibah	157.182.926.000	246.346.967.344	89.164.041.344	57 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	17.275.000.000	16.200.000.000	(1.075.000.000)	6 %
5.2	BELANJA MODAL	493.352.279.317	505.693.492.098	12.341.212.781	3 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	26.984.944.650	11.125.439.017	(15.859.505.633)	59 %

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	121.716.757.194	114.688.248.950	(7.028.508.244)	6 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	246.457.834.190	237.555.715.706	(8.902.118.484)	4 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.428.121.333	95.106.576.328	22.678.454.995	31 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.429.421.950	47.217.512.097	21.788.090.147	86 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	335.200.000	0	(335.200.000)	100 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000	17.765.697.325	(7.234.302.675)	29 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	17.765.697.325	(7.234.302.675)	29 %
5.4	BELANJA TRANSFER	672.631.182.334	686.433.048.334	13.801.866.000	2 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	35.291.878.600	35.864.878.600	573.000.000	2 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	637.339.303.734	650.568.169.734	13.228.866.000	2 %
	Jumlah Belanja	4.168.280.906.805	4.494.601.907.090	326.321.000.285	8 %
	Total Surplus/(Defisit)	(50.418.758.422)	(142.746.291.702)	(92.327.533.280)	-183 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	126.653.758.422	183.981.291.702	57.327.533.280	45 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	126.653.758.422	183.981.291.702	57.327.533.280	45 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	126.653.758.422	183.981.291.702	57.327.533.280	45 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	76.235.000.000	41.235.000.000	(35.000.000.000)	46 %
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	35.000.000.000	0	(35.000.000.000)	100 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	41.235.000.000	41.235.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	76.235.000.000	41.235.000.000	(35.000.000.000)	46 %
	Pembiayaan Netto	50.418.758.422	142.746.291.702	92.327.533.280	183 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

